

RASIONAL-DEMOKRATIS

Proyeksi Partisipasi Memilih Kaum Muda

Dimas Ramadhan

Peneliti, Populi Center

dimsramadhan@gmail.com

Abstrak

Pada setiap pelaksanaan pemilu, Indonesia dibayangi angka partisipasi memilih. Padahal, partisipasi dibutuhkan sebagai legitimasi bagi pemerintah untuk bekerja. Tanpa adanya partisipasi politik yang memadai dari warganya, demokrasi akan pincang, atau bahkan tidak berjalan. Tulisan ini hendak membahas mengenai faktor apa saja yang dapat mendorong angka partisipasi memilih terutama pemilih Gen Z dan Milenial. Mencermati partisipasi kedua kelompok generasi tersebut menjadi penting, mengingat mereka ialah kelompok penduduk terbesar berdasarkan usia. Temuan dalam tulisan ini menunjukkan, partisipasi memilih kelompok muda berkaitan dengan erat dengan derajat kepercayaan mereka terhadap sejumlah lembaga pemerintah. Selain itu, evaluasi kepuasan kelompok Gen Z dan Milenial terhadap kinerja pemerintah, serta pengetahuan mereka terhadap pemilu, turut menjadi faktor yang mendorong keputusan kelompok ini berpartisipasi untuk memilih.

Kata kunci : Partisipasi, Gen Z , Milenial

Abstract

In every election, Indonesia is overshadowed by the voter turnout. In fact, political participation is needed as the legitimacy for the government to work. Without adequate political participation from its citizens, democracy will cripple, or even fail. This paper is intended to discuss what factors can encourage voter turnout, especially for Gen Z and Millennial voters. Observing the participation of the two generational groups would be important, considering that they are the largest population group by age. The findings in this paper show that the participation in youth groups election is closely related to their degree of trust in government institutions. In addition, the evaluation of the satisfaction of the Gen Z and Millennial groups with the government's performance, as well as their knowledge of elections, are also factors that encourage this group's decision to participate in the voting.

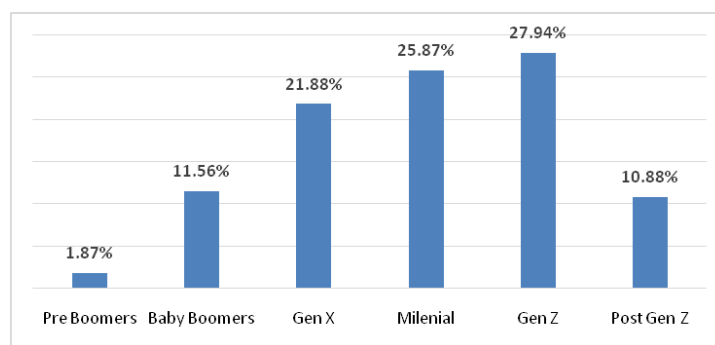
Keywords: Participation, Gen Z, Milenial

Pendahuluan

Pada tahun 2024 mendatang, Indonesia akan melaksanakan pemilu secara langsung untuk yang kelima kalinya. Berbeda dengan sebelumnya, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Legislatif, dan Pemilihan Kepala Daerah akan diselenggarakan pada tahun yang sama. Untuk memastikan pemilu berjalan sesuai harapan, para pemangku kebijakan pemilu, dalam hal ini Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), telah menyepakati Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2024, sebagai landasan pelaksanaan pemilu.

Salah satu di antara tahapan paling krusial dari pelaksanaan pemilu ialah tahapan penyusunan daftar pemilih. Pada Juli 2022, KPU mengumumkan bahwa jumlah pemilih sementara untuk pemilu 2024 sebesar 190.022.169 orang (Detik.com, 13/07/22). Dari jumlah tersebut, diperkirakan kelompok pemilih paling besar ialah Generasi Z dan Milenial. Bila menilik hasil sensus Badan Pusat Statistik tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia yang masuk kategori Gen Z (lahir pada rentang tahun 1997-2012) sebesar 27,94 persen, sementara kelompok Milenial (lahir antara tahun 1981-1996) sebesar 25,87 persen (BPS, 21/01/21). Dengan total jumlah penduduk 270 juta jiwa, kedua kelompok usia ini menjadi yang paling dominan di antara kelompok usia lainnya, dengan perkiraan mencapai 60 persen dari keseluruhan jumlah pemilih (MediaIndonesia.com, 12/10/21).

Chart 1.
Proporsi Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia



Sumber : BPS, 2020

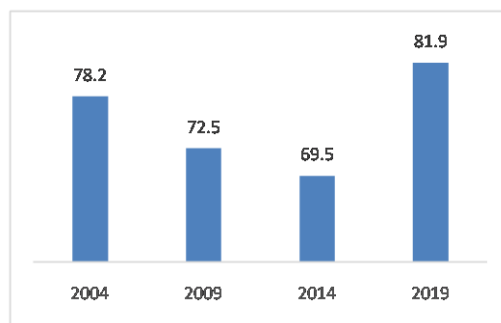
Menjadi menarik untuk melihat bagaimana proyeksi partisipasi memilih GenZ dan Milenial pada tahun 2024. Ini disebabkan kedua kelompok tersebut merupakan generasi dengan usia produktif terbesar. Dengan jumlah sebesar itu, partisipasi mereka akan menentukan jalannya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Lebih dari itu, partisipasi mereka juga akan turut mempengaruhi jalannya demokrasi di Indonesia, tak terkecuali dalam pemilu. Hal ini terlihat dari pelaksanaan pemilu 2019 serta pilkada 2020, dimana partai politik dan para kandidat berupaya merebut perhatian kelompok Gen Z dan Milenial sebagai lumbung suara.¹ Dalam hal pemilu, persoalannya

¹Selain menjadi pemilih terbesar dalam pemilu mendatang, generasi Z dan milenial juga menjadi aktor penting dari proses sosialisasi politik kepada generasi tua. Hal ini dimungkinkan dikarenakan politik yang semakin memiliki

kemudian sejauhmana kedua kelompok usia ini akan memberikan hak suaranya pada pemilu yang akan datang.

Melakukan proyeksi atas partisipasi pemilih Gen Z dan Milenial pada pemilu 2024 diperlukan paling tidak disebabkan karena dua hal. Pertama, secara umum tren partisipasi memilih di Indonesia cenderung fluktuatif. Dalam tiga pelaksanaan awal pemilihan presiden secara langsung, terdapat tren penurunan partisipasi masyarakat, mulai dari 78,2 persen saat pertama kali dilaksanakan tahun 2004, sedikit menurun menjadi 72,5 persen pada lima tahun berikutnya. Pada 2014, angka partisipasi kembali menurun menjadi hanya 69,5 persen. Baru kemudian pada tahun 2019 angka partisipasi naik hingga mencapai 80an persen. Dengan memperhatikan komposisi penduduk hasil sensus BPS di atas, partisipasi kedua kelompok ini akan sangat menentukan apakah pemilu mendatang akan mengalami peningkatan partisipasi, atau malah sebaliknya, yang terjadi kemudian ialah penurunan.

Chart 2.
Tren Partisipasi Dalam Pilpres Sejak 2004



Sumber: Diolah

Kemudian yang kedua ialah, secara teoritik, keinginan seseorang untuk berpartisipasi dalam pemilu salah satunya ditentukan oleh kepercayaan pemilih terhadap pemerintahan. Dalam tiga tahun terakhir, pemerintahan Joko Widodo - KH. Ma'ruf Amin disibukkan dengan berbagai tantangan yang tidak mudah. Salah satunya tentu saja penanganan COVID-19, yang membuat sebagian penduduk kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan penghasilan akibat pembatasan sosial. Kemudian, di saat situasi mulai membaik, pemerintah harus memutar otak dalam menekan ancaman

pengaruh besar dari dunia digital, sedangkan dunia digital lebih banyak dipahami oleh generasi muda. Proses re-sosialisasi ini juga yang turut menjadi bahasan mengapa kelas menengah di perkotaan hijau ([Jati, 2016](#)). Melalui kerangka berpikir yang sama, dapat ditekankan bahwa terdapat potensi re-sosialisasi terhadap generasi yang lebih tua.

resesi ekonomi imbas perang yang terjadi antara Russia dan Ukraina baru-baru ini. Guncangan ekonomi yang sudah mulai dirasakan saat ini membuat pemerintah harus mengambil kebijakan yang tidak populer, yakni mengalihkan subsidi Bahan Bakar Minyak menjadi bantuan sosial demi menjaga daya beli masyarakat. Hal yang menjadi perhatian bagi pemilih, khususnya kelompok Gen Z dan penting untuk melihat tingkat kesadaran mereka (Asy'ari, 2019).

Tulisan ini bermaksud melakukan pemetaan awal mengenai proyeksi partisipasi politik Gen Z dan Milenial (selanjutnya disebut dengan istilah pemilih muda) pada pemilu 2024. Adapun hal yang ingin dijawab dalam tulisan ini ialah: (1) Sejauh mana intensitas pemilih muda untuk berpartisipasi dalam pemilu 2024, dan (2) Faktor apa yang mungkin mempengaruhi mereka untuk memberikan hak pilihnya pada pemilu mendatang?

Literatur

Terdapat banyak studi yang membahas faktor-faktor yang mendorong partisipasi pemilih. Dalam rumpun ilmu politik, partisipasi pemilih merupakan bahasan utama dalam kajian tentang perilaku pemilih. Kajian ini memfokuskan pada pertanyaan besar, yaitu mengapa seseorang terdorong untuk memilih atau memberikan suaranya dalam pemilu, sementara terdapat juga yang tidak; serta mengapa seseorang memilih suatu partai atau

Milenial, ialah sejauhmana mereka meyakini kapasitas pemerintah dalam menangani persoalan-persoalan yang berkaitan dengan mereka. Keyakinan mereka kepada pemerintah saat ini, mencerminkan keyakinan mereka terhadap pemerintahan selanjutnya sebagai produk pemilu tahun 2024. Selain itu, identifikasi tingkat partisipasi mamilih kelompok Generasi Z dan Milenial juga kandidat, dan bukan memilih partai/kandidat lainnya. Pertanyaan tersebut kemudian memunculkan tiga pendekatan utama, antara lain pendekatan sosiologis, psikologis, dan pilihan rasional (Roth: 2008).

Pendekatan sosiologis berargumen bahwa tindakan politik seseorang, termasuk dalam hal ini ialah menggunakan hak pilih, tidak terlepas dari kecenderungan karakteristik lingkungan sosialnya. Pendekatan sosiologis yang dipopulerkan oleh para sarjana ColumbiaUniversity ini menekankan pentingnya aspek demografi seseorang dalam memahami perilaku memilih, antara lain meliputi usia, jenis kelamin, status ekonomi, agama, pekerjaan, tempat tinggal, termasuk keterlibatan dalam kegiatan kelompok-kelompok sosial.

Kemudian yang kedua ialah pendekatan sosio-psikologis, yang dipelopori oleh para sarjana dari Michigan University. Menurut pendekatan ini, pada dasarnya seseorang

memiliki sikap dan orientasi politik yang relatif stabil dan tidak akan berubah apabila tidak terdapat perubahan pribadi yang drastis atau situasi politik yang ekstrim. Dalam pendekatan ini, sikap dan orientasi politik seseorang kemudian dihubungkan dengan variabel utama yakni keanggotaan afektif atau perasaan dekat seseorang terhadap suatu kelompok masyarakat atau partai politik, yang sering disebut dengan istilah identifikasi partai atau Party ID. Selain Party ID, pendekatan ini juga menekankan pada *political engagement*, yaitu sejauhmana seseorang berupaya untuk terikat dengan politik, baik itu aktif dalam sebuah perkumpulan ataupun mengikuti berita perkembangan mengenai politik. Perasaan dekat dengan partai, dan juga keterikatan politik, mendorong seseorang untuk memberikan suaranya dalam pemilu.

Kemudian yang ketiga ialah pendekatan pilihan rasional. Pendekatan yang dipelopori oleh V.O Kay ini berpendapat bahwa pada dasarnya seseorang bertindak atau membuat pilihannya secara retrospektif, yaitu penilaiannya terhadap kemampuan kandidat dalam menyelesaikan masalah. Keputusan memilih orang yang rasional selalu berorientasi pada hasil, baik hasil yang diharapkan, mau pun hasil yang diantisipasi.

Sementara itu, partisipasi politik sendiri dapat dimaknai sebagai keterlibatan warga negara dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan politik, termasuk diantaranya ialah terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan politik yang dikeluarkan pemerintah (Abramson, 1995). Asumsi yang melatarbelakanginya ialah bahwa setiap individu memahami betul apa yang terbaik untuk dirinya, sehingga ia berhak menentukan arah keputusan politik. Termasuk di dalamnya ialah keterlibatan dalam melakukan seleksi orang-orang yang akan menduduki jabatan publik (Schumpetter, 1954; Nie & Verba, 1987).

Partisipasi politik ditentukan oleh tingkat kesadaran warga serta sistem politik yang berjalan (Paige, 1971). Kombinasi dari keduanya menghasilkan model-model partisipasi sebagai berikut. Pertama, kesadaran politik dan kepercayaan terhadap sistem politik yang tinggi menghasilkan model partisipasi politik yang aktif. Kedua, kesadaran politik tinggi dan kepercayaan terhadap sistem politik yang rendah, menghasilkan model partisipasi yang ‘tidak terlembaga’ seperti protes, boikot, dan lain sebagainya (Mujani, 2007). Ketiga, kesadaran politik rendah yang diikuti dengan kepercayaan kepada sistem politik yang tinggi, menghasilkan model partisipasi yang pasif. Keempat, kesadaran politik yang rendah diikuti dengan kepercayaan terhadap sistem politik yang juga rendah, menghasilkan model partisipasi politik apatis.

Secara umum terdapat dua bentuk partisipasi politik, yakni konvensional dan non konvensional (Kaase & Marsh, 1979). Partisipasi konvensional ialah segala tindakan yang bertujuan

memengaruhi output politik berdasarkan aturan dan prosedur yang baku. Termasuk di dalamnya ialah menentukan pejabat publik atau menggalang dukungan untuk seorang calon. Sebaliknya, bentuk partisipasi politik non konvensional ialah aktifitas warga negara yang dilakukan dengan tujuan memengaruhi hasil akhir dari proses politik dengan cara yang tidak berhubungan dengan norma dan kebiasaan yang berlaku. Contoh umum dari partisipasi politik non konvensional ialah demonstrasi, mogok kerja, ataupun bentuk-bentuk protes lainnya. Dalam tulisan ini, partisipasi politik yang dimaksud ialah aktivitas warga negara memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum.

Beberapa studi telah cukup banyak yang membahas tentang keterkaitan antara partisipasi memilih dengan sejumlah faktor, dimana sejumlah variabel yang digunakan pada dasarnya merupakan turunan dari tiga pendekatan di atas. Namun demikian, membahas partisipasi memilih muda, dalam hal ini Gen Z dan Milenial, jumlahnya belum terlalu banyak, terlebih di Indonesia. Sebagian besar kajian memilih pemuda memfokuskan pada penggunaan teknologi internet dan media sosial (Hendricks & Frye, 2013; Hernandez, 2019), dan juga pendekatan atau cara kampanye yang dilakukan oleh aktor politik (Setiawan *et al.*, 2020). Perhatian para sarjana terhadap faktor media sosial bukan tanpa alasan. Kemenangan Barack Obama pada pemilu di Amerika Serikat (AS) pada tahun 2008 menunjukkan betapa efektifnya seorang kandidat mengkampanyekan dirinya melalui media sosial, yang dalam kasus ini, ialah Facebook. Melalui media sosial seorang kandidat dapat langsung menyapa calon memilih tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Pada perkembangannya, temuan penelitian yang cukup menarik dilakukan oleh Shahimi *et al.* (2020), yang menyebut bahwa media sosial tidak signifikan mempengaruhi keputusan kaum muda untuk memilih. Faktor keluarga, masih berperan dominan, selain juga sikap individu terkait kesiapan dirinya untuk memilih.

Beberapa studi tentang partisipasi memilih muda di atas, yang mengaitkan kelompok usia produktif dan siap bekerja ini dengan penggunaan media sosial, mengandaikan memilih muda cukup mudah untuk dipengaruhi pilihannya tanpa ada proses evaluasi yang mumpuni. Di satu sisi, anggapan seperti ini bisa dimaklumi sebab sebagian besar memilih muda tidak atau belum memiliki pengalaman dan kapasitas mencerna informasi yang diterimanya terutama melalui perangkat gawai. Meski demikian, penulis juga mempertimbangkan sejumlah faktor lain yang bersifat retrospektif, antara lain penerimaan terhadap performa demokrasi yang saat ini sedang berjalan atau dipraktekkan, dan juga kepercayaan terhadap lembaga demokrasi yang ada. Dalam konteks ini,

penting kiranya menempatkan kelompok pemilih muda sebagai warga negara yang kritis dan rasional.

Metode, Data, dan Pengukuran

Dalam tulisan ini metode yang digunakan ialah kuantitatif. Menurut Creswell (2014) metode kuantitatif merupakan pendekatan untuk menguji teori objektif dengan menguji hubungan antar variabel yang dapat diukur dengan menggunakan instrumen, sehingga data jumlah dapat dianalisis dengan menggunakan prosedur statistik. Data diperoleh dari survei nasional di 34 provinsi yang dilakukan lembaga Populi Center pada bulan Juni hingga Juli tahun 2022. Jumlah responden secara keseluruhan ialah 1.200 orang, dengan *margin of error* + 2.83 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen. Wawancara dilakukan dengan cara tatap muka menggunakan kuesioner terstruktur sebagai instrumen utama. Seluruh responden dipilih menggunakan sistem acak bertingkat (*multi-stage random sampling*) mulai dari provinsi, kab/kota, desa/kelurahan, hingga rumah tangga. Untuk tujuan penelitian ini, jumlah responden yang dianalisis sebesar 563 orang, terdiri dari 264 laki-laki dan 299 perempuan, dengan rentang usia 17 hingga 39 tahun, menyesuaikan dengan karakteristik milenial yang ditetapkan oleh BPS.

Hipotesis utama dalam penelitian ini ialah terdapat hubungan antara partisipasi memilih dengan kepercayaan terhadap

pemerintah. Partisipasi diukur dari niat atau intensi pemilih muda untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu 2014, yang kemudian oleh penulis diberi label 'Vote' yang juga merupakan variabel terikat (*dependent variable*). Sementara itu variabel tergantung (*independent variable*) yang dianalisis dalam tulisan ini ialah kepercayaan politik. Kepercayaan politik merupakan salah satu wujud lain dari legitimasi pemerintah berdasarkan penilaian warga negara terhadap pemerintahan. (Levi *et al.*, 2009). Dalam negara demokratis, kepercayaan politik merupakan sesuatu yang menghubungkan antara warga negara sebagai pemilik kedaulatan terbesar, dengan pemerintah atau negara yang mengadministrasikan atau mengelola kesejahteraan melalui keputusan-keputusan politik. Kepercayaan politik, umumnya dirumuskan sebagai keyakinan warga negara terhadap objek politik (lembaga/institusi) atau politisi sebagai aktor politik, untuk dapat menghasilkan output kebijakan yang berkualitas, membawa perbaikan ekonomi, serta kesejahteraan sosial (Adinugroho, 2021). Oleh sebab itu, kepercayaan politik erat kaitannya dengan dukungan dan penilaian terhadap demokrasi secara keseluruhan, yang pada gilirannya menentukan apakah seseorang akan menggunakan hak pilihnya atau tidak. Studi yang dilakukan Grönlund & Setälä (2007)

misalnya, menunjukkan adanya korelasi positif antara kepercayaan terhadap parlemen dan politisi di dalamnya dengan partisipasi politik.

Berangkat dari konsep di atas, kepercayaan terhadap pemerintah merupakan penilaian responden kepada sejumlah lembaga pemerintah, yaitu lembaga eksekutif dan legislatif yang orang atau anggotanya dipilih melalui proses pemilu. Selain itu, lembaga peradilan dan penegak hukum juga diperhitungkan di sini. Penilaian kepercayaan menggunakan skala 1 hingga 10, dimana 1 berarti sangat tidak percaya dan 10 sangat percaya, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 1.
Pengukuran Kepercayaan Terhadap Pemerintah

Lembaga	Skala									
Presiden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DPR RI / DPRD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DPD RI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Polri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KPK	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kejaksaan Agung	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mahkamah Konstitusi (MK)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mahkamah Agung (MA)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Delapan lembaga di atas merupakan lembaga pemerintah yang bergerak di rumpun masing-masing sebagaimana prinsip trias politika. Namun umumnya, keseluruhan lembaga tersebut seringkali disederhanakan menjadi lembaga pemerintah, bahkan termasuk presiden itu sendiri. Karena terdiri dari beragam jenis lembaga, penting untuk melihat apakah antar item berhubungan atau konsisten satu sama lain (Cresswell, op cit). Penulis kemudian melakukan uji Cronbach Alpha. Hasilnya, nilai Cronbach Alpha yang muncul ialah 0.9456. Dengan demikian, setiap item atau lembaga yang dievaluasi derajat kepercayaannya konsisten satu sama lain. Respon kelompok muda terhadap delapan lembaga tersebut kemudian diindeks dan diberi label 'Trust_inst' yang berarti kepercayaan terhadap institusi. Indeks dibuat menggunakan *Confirmatory Factor Analysis* dengan model equation sebagai berikut.

$$a = \frac{k}{k-1} \left(\frac{\sum s_i}{s_t} \right)$$

Selain variabel kepercayaan terhadap lembaga pemerintah, penulis juga memasukkan sejumlah variabel lainnya sebagai kontrol untuk melihat apakah hubungan antara 'Vote' dan 'Trust_inst' stabil atau tidak. Beberapa variabel dalam pilihan rasional penulis masukkan, antara lain evaluasi kepuasan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Puasjkw), evaluasi terhadap

jalannya demokrasi (Ev_dem), dan kondisi penghasilan saat ini dibanding setahun lalu (Income). Seperti dijelaskan di atas, asumsi dalam pendekatan pilihan rasional ialah bahwa seseorang bertindak dengan memperhitungkan hasil yang didapatnya. Dalam hal ini, orang yang tidak puas dengan kinerja pemerintah mungkin saja enggan menggunakan hak suaranya. Sebab keputusan untuk memilih memerlukan *effort*, mulai dari memastikan terdaftar sebagai pemilih, mengorbankan waktu saat antri untuk masuk ke bilik, dan sebagainya. Apabila kinerja pemerintah hasil pemilu demokratis tidak memuaskan dan mensejahterakan dirinya, maka ia telah ‘merugi’ terutama jika dibandingkan dengan mereka yang tidak menggunakan hak pilihnya. Variabel kontrol lainnya ialah pengetahuan adanya pemilu di tahun 2024 mendatang (Tahu_pemilu), penggunaan medsos (Akses_medsos), wilayah tempat tinggal (Urban-rural), dan status sosial ekonomi yang diukur dari tingkat pendapatan responden (Income_ses).

Hasil

Data menunjukkan, pemilih muda memiliki niat atau intensi untuk memilih yang sangat tinggi. Sebesar 94,14 persen pemilih Gen Z dan Milenial menyatakan akan menggunakan hak pilihnya pada pemilu tahun 2024 mendatang, dan hanya sebesar 5,86 persen saja yang menyatakan tidak akan memilih. Hal ini sejalan dengan temuan survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas pada bulan April tahun 2022, dimana jumlah pemilih Gen Z dan Milenial yang menyatakan akan memilih ialah 86,7 persen (Kompas.id, 08/04/2022).

Tabel 2.
Deskripsi Variabel

Variabel	Obs	Mean	Std.Dev	Min	Max
Vote	563	.9413854	.2351108	0	1
Tr_inst	494	1.75e-10	1	- 2.98085	- 2.079409
Puasjkw	550	2.398182	.6636519	1	4
Ev_dem	527	2.364326	.6438497	1	4
Tahu_pemilu	563	.687389	.4639695	0	1
Income	563	2.83659	1.077897	1	5
Intens_medsos	563	2.483126	1.240329	0	1
Urban_rural	563	1.680284	.4667811	1	2
Income_ses	563	2.294849	1.100837	1	5

Sementara itu, Presiden menjadi lembaga dengan tingkat kepercayaan tertinggi (skor 6-10) yaitu sebesar 76,4 persen, dengan rerata kepercayaan 7,41. Lembaga pemerintah lainnya mendapat rerata kepercayaan di bawah 7, antara lain yaitu Polri (6,52), Mahkamah Agung (6,48), Kejaksaan

Agung (6,47), Mahkamah Konstitusi (6,40), KPK (6,37), DPR RI/DPRD (6,19), dan DPD RI (6,09). Secara umum rerata kepercayaan pemilih Gen Z dan Milenial terhadap sejumlah lembaga tersebut cukup baik, yang ditunjukkan dengan tidak adanya rerata kepercayaan di angka 5.

Tabel 3.
Kepercayaan Terhadap Lembaga

Lembaga	Kepercayaan 1 - 5	Kepercayaan 6-10	Rerata Kepercayaan
Presiden	16,4%	76,4%	7,41
Polri	28,0%	64,4%	6,52
MA	27,3%	59,2%	6,48
Kejaksaan Agung	28,2%	59,6%	6,47
MK	26,3%	59,7%	6,40
KPK	29,3%	61,8%	6,37
DPR RI / DPRD	34,3%	56,7%	6,19
DPD RI	33,5%	54,0%	6,09

Kepercayaan terhadap Presiden yang cukup tinggi, berdampak pada tingkat kepuasan pemilih muda terhadap kinerja Joko Widodo. Terdapat 61,45 persen yang menyatakan sangat puas dan puas. Meski demikian, jumlah yang menyatakan ketidakpuasannya juga cukup besar, yakni 38,55 persen, dan sisanya menolak menjawab.

Bagaimana kaum muda menilai pelaksanaan demokrasi? Sebesar 69,07 persen menjawab pelaksanaan demokrasi di Indonesia berjalan baik, sementara porsi yang menjawab buruk cukup besar yakni 34,53 persen, dan sisanya menjawab tidak tahu atau tidak menjawab. Pengetahuan pemilih Gen Z dan Milenial terkait akan diselenggarakannya pemilu di tahun 2024 jumlahnya sebanyak 68,74 persen, dan yang tidak/belum mengetahui sebesar 31,26 persen.

Kemudian, saat ditanya mengenai kondisi penghasilan pribadi/rumah tangga saat ini dibandingkan setahun yang lalu, terdapat 46,54 persen yang menjawab terdapat peningkatan. Jumlah yang menjawab sama saja (tidak meningkat namun juga tidak menurun) jumlahnya sebesar 23,45 persen. Sementara yang menjawab terdapat penurunan jumlahnya cukup besar yaitu 30,1 persen, dan sisanya tidak menjawab.

Tabel 4.
Analisa Regresi

Vote	Coef	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf	Interval]	Sig
Tr_inst	1.103	.254	4.35	0	.605	1.6	***
Puasjkw	.847	.424	2.00	.046	.016	1.677	**
Ev_dem	.422	.413	1.02	.307	-.388	1.231	
Tahu_pemilu	1.39	.512	2.72	.007	.387	2.394	***
Income	.772	.277	2.79	.005	.23	1.314	***
Intens_med sos	.018	.228	0.08	.938	-.429	.464	
Urban_rural	-.643	.591	-1.09	.276	-1.801	.515	
Income_ses	-.116	.222	-0.52	.602	-.552	.32	
Constant	-.848	1.881	-0.45	.652	-4.536	2.839	
Mean dependent var	0.955	SD dependent var				0.207	
Pseudo r-squared	0.254	Number of obs				469	
Chi-square	43.518	Prob > chi2				0.000	
Akaike crit. (AIC)	145.982	Bayesian crit. (BIC)				183.338	

*** $p < .01$, ** $p < .05$, * $p < .1$

Tabel 4 menunjukkan beberapa variabel yang memiliki hubungan signifikan terhadap partisipasi memilih pemuda. Variabel kepercayaan terhadap lembaga atau institusi pemerintah, yang ditandai dengan label Tr_inst, menjadi faktor yang paling signifikan, dengan nilai *p-value* nya ialah 0.000. Dalam hal ini, semakin tinggi tingkat kepercayaan kepada lembaga-lembaga pemerintah, semakin besar pula kemungkinan kelompok Gen Z dan Milenial untuk berpartisipasi dalam pemilu 2024. Signifikansi kepercayaan terhadap pemerintah dengan arah yang positif terhadap partisipasi memilih tidak berubah saat ia dikontrol dengan sejumlah variabel lain.

Pengaruh kepercayaan terhadap lembaga-lembaga pemerintah terhadap keinginan atau intensi kelompok Gen Z dan Milenial untuk berpartisipasi dalam pemilu sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4, tidak bergantung pada apakah ia merasa puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo atau tidak; apakah ia menilai pelaksanaan demokrasi berjalan

dengan baik atau tidak; apakah ia telah mengetahui pemilihan umum akan dilaksanakan pada tahun 2024 atau tidak; apakah penghasilannya membaik dibanding setahun lalu atau tidak; apakah ia mengakses sejumlah media sosial atau tidak; apakah ia tinggal di wilayah perkotaan atau perdesaan, dan; apakah ia memiliki status sosial ekonomi yang baik atau tidak. Dengan demikian, kepercayaan terhadap lembaga pemerintah benar-benar independen terhadap keinginan kelompok pemilih muda untuk memberikan hak suaranya dalam pemilu mendatang.

Persepsi pemilih muda terkait kepuasan terhadap kinerja pemerintah juga signifikan ($p\text{-value} = 0.046$) mempengaruhi kecenderungan pemilih Gen Z dan Milenial untuk berpartisipasi dalam pemilu. Hal yang menarik untuk digarisbawahi ialah arah hubungan antar variabel. Analisa regresi menunjukkan, semakin kelompok Gen Z dan Milenial merasa tidak puas dengan kinerja presiden, semakin meningkatkan kemungkinan kelompok ini untuk memilih. Walaupun hubungan antara kepuasan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo dan keinginan untuk memilih bersifat samar, ini menunjukkan bahwa pemilih muda mampu untuk melakukan penilaian kritis sebelum melakukan partisipasi politik. Keinginan mereka untuk memilih dalam pemilu dapat dimaknai sebagai sebuah tindakan

demokratis dalam merespon ketidakpuasan. Dalam hal ini, memberikan suara dalam pemilu dianggap sebagai momentum atau kesempatan untuk merubah kondisi hidupnya agar menjadi lebih baik. Motivasi memilih seperti ini juga terlihat pada variabel kondisi ekonomi ($p\text{-value} = 0.005$). Pemilih kelompok Gen Z dan Milenial yang merasa penghasilan pribadi/rumah tangganya menurun dibandingkan satu tahun yang lalu, lebih besar kemungkinan mereka untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024.²

Variabel selanjutnya yang juga mempengaruhi keinginan pemilih muda untuk partisipasi dalam pemilu ialah pengetahuan mereka terkait akan dilaksanakannya pemilihan umum pada tahun 2024 ($p\text{-value} = 0.007$). Dibandingkan mereka yang tidak mengetahui pelaksanaan pemilu 2024, mereka yang telah menerima informasi tentang jadwal pelaksanaan pemilu lebih besar keinginannya untuk berpartisipasi. Sementara itu, sebagaimana telah disebut dalam penelitian yang pernah ada, akses pemilih muda terhadap sejumlah media sosial tidak berpengaruh signifikan dalam mendorong mereka untuk menggunakan hak pilihnya.

² Dalam bentuk yang lain, partisipasi pemilih juga ditentukan oleh seberapa besar insentif aktor politik petahana dalam mensejahterakan warganya melalui sejumlah program bantuan atau subsidi. Lihat (Buehler, 2011; Schraufnagel, Buehler & Lowry-Fritz, 2014).

Penutup dan Diskusi

Temuan utama dalam penelitian ini menunjukkan beberapa hal penting. Pertama, keinginan pemilih yang termasuk dalam kelompok Gen Z dan Milenial, dipengaruhi secara signifikan oleh derajat kepercayaan mereka terhadap lembaga-lembaga pemerintahan, kepuasan terhadap kinerja pemerintah, serta pengetahuan mereka terkait pelaksanaan pemilu. Di saat yang bersamaan, pengaruh akses kepada media sosial terhadap partisipasi memilih tidak sebesar yang diperkirakan. Hal ini mungkin disebabkan persoalan politik dan pemerintahan tidak menjadi perhatian utama mereka saat mengakses media sosial.

Kedua, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa model partisipasi politik kelompok Gen Z dan Milenial termasuk dalam kategori partisipasi aktif. Hal ini terlihat dari antusiasme kelompok ini untuk memilih, cukup tingginya kesadaran / pengetahuan mereka tentang pemilu, serta kepercayaan mereka yang positif terhadap lembaga pemerintah yang

berjalan dalam koridor demokrasi. Kombinasi sikap seperti ini dipercaya akan melahirkan sistem demokrasi yang stabil.

Bayang-bayang penurunan angka partisipasi pada pemilu mendatang tidak, atau setidaknya belum tergambar dalam temuan penelitian ini. Meski demikian, penelitian sejenis masih perlu dilakukan kembali sebab hasil dalam tulisan ini masih bersifat prematur. Pemerintah perlu untuk terus meningkatkan kepercayaan publik bahwa mereka dapat diandalkan untuk merespon apa yang menjadi tantangan yang dihadapi warganya, terutama kelompok Gen Z dan Milenial. Sejalan dengan itu, lembaga penyelenggara pemilu baik itu KPU mau pun Bawaslu perlu untuk terus melakukan sosialisasi yang efektif terkait pelaksanaan pemilu tahun 2024. Tanpa adanya upaya untuk terus meningkatkan angka partisipasi, di masa mendatang kita akan menghadapi generasi pemilih yang tidak siap, apatis, serta tidak mendukung produk hasil demokrasi dari kelompok usia terbesar di zamannya.

REFERENSI

Buku

- Abramson, P. R. (1995). Political Participation. The Encyclo.
- Adinugroho, I. (2021). Understanding the Psychological Perspective of Political Trust in Indonesia Context. *Buletin Psikologi*, 29(2), 161-177.
- Asy'ari, Hasyim. (2019). *Konsolidasi Demokrasi Pergulatan Politik Pemilu Di Indonesia*. Thafa Media. Yogyakarta.
- Buehler, Michael. (2011). *Vested Interests Impede Subsidy Reform in Indonesia* (Oxford: Oxford Analytica).
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Grönlund, K., & Setälä, M. (2007). Political trust, satisfaction and voter turnout. *Comparative European Politics*, 5(4), 400-422.
- Hendricks, J., & Frye, J. (2013). Social Media and the Millennial Generation in the 2010 Midterm Election. *Social Media Usage and Impact*, 183-199.
- Hernandez, Y. (2019). The Technology Gap Across Generations: How Social Media Affects the Youth Vote. *Political Analysis*, 20(1), 1.
- Jati, W. R. (2016). Memaknai Kelas Menengah Muslim Sebagai Agen Perubahan Sosial Politik Indonesia. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 16(1), 133-151.
- Kaase, M., & Marsh, A. (1979). Political Action. A Theoretical Perspective. *Political Action: Mass Participation In Five Western Democracies*, 27-56.
- Mujani, S. (2007). *Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik Di Indonesia Pasca Orde Baru*. Gramedia Pustaka Utama.
- Paige, J. M. (1971). Political Orientation and Riot Participation. *American Sociological Review*, 810-820.
- Roth, Dieter. (2008). *Studi Pemilu Empiris: Sumber, Teori-Teori, Instrumen dan Metode*. Friedrich Neuman Stiftung Fur Die Freiheit, Jakarta.
- Schraufnagel, S., Buehler, M., & Lowry-Fritz, M. (2014). Voter turnout in democratizing Southeast Asia: A comparative analysis of electoral participation in five countries. *Taiwan Journal of Democracy*, July.
- Schumpeter, J. (1954). *History of Economic Thought*. London, George.
- Setiawan, A., Sripokangkul, S., Kamil, M., Shidiqi, I. T., & Hadi, K. (2020). The Influence of Political Actors on Millennial Votes: A Comparative Study of Indonesia, Thailand and the Philippines. *Journal of Research and Development Institute, Rajabhat Maha Sarakham University*, 7 (June), 563–576.
- Shahimi, W. R. M. A., Chin, K. Y., Hanafi, A. H. A., & Husin, M. (2020). Voting at 18: Are Malaysian Young Voters Ready to Vote?. *International Journal of Advanced Research in Education and Society*, 2(2), 96-105.
- Verba, S., & Nie, N. H. (1987). *Participation in America: Political democracy and social equality*. University of Chicago Press.

Link berita:

- BPS, 21 Januari 2021, Hasil Sensus Penduduk 2020, <https://demakkab.bps.go.id/news/2021/01/21/67/hasil-sensus-penduduk-2020.html>, akses 30 Oktober 2022.
- Detik.com, 13 September 2022, KPU Ungkap Daftar Pemilih Sementara Pemilu 2024 Turun Jadi 190 juta, <https://news.detik.com/berita/d-6176813/kpu-ungkap-daftar-pemilih-sementara-pemilu-2024-turun-jadi-190-juta>, akses 28 Oktober 2022.

- Kompas.id, 8 April 2022, 87 Persen Milenial dan Generasi Z Antusias Ikuti Pemilu 2024, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/04/08/87-persen-milenial-dan-generasi-z-antusias-ikuti-pemilu-2024>, akses 28 Oktober 2022.
- Media Indonesia, 12 Oktober 2021, Pemilih di Pemilu 2024 Didominasi Milenial Nasdem Gencarkan Edukasi Politik, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/439516/pemilih-di-pemilu-2024-didominasi-milenial-nasdem-gencarkan-edukasi-politik>, akses 28 Oktober 2022.